



Finansial Inklusi Melalui Layanan Keuangan Digital Menciptakan Kesenjangan Literasi-Inklusi

Eddy Irsan Siregar¹, Gunawan Santoso^{2*}, Meilanta Rantina²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

³ Universitas Muhammadiyah Cileungsi, Jawa Barat, Indonesia

Email: siregareddy@gmail.com, mgunawansantoso@gmail.com, meilantarantina1992@gmail.com²

*Corresponding email: mgunawansantoso@gmail.com

Abstrak - Penelitian ini menganalisis peran layanan keuangan digital dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia, dengan fokus pada capaian, tantangan, dan strategi pengembangan ke depan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini mengkaji berbagai data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan pelaku industri fintech. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 80,51 persen pada 2025, meningkat 5,49 persen dari 75,02 persen pada 2024. Namun, capaian ini menyimpan paradoks: indeks literasi keuangan baru mencapai 66,46 persen, menciptakan kesenjangan literasi-inklusi (*literacy-inclusion gap*) sebesar 14,05 persen. Layanan keuangan digital termasuk fintech lending, e-wallet, QRIS, dan platform pembayaran digital telah menjadi pendorong utama perluasan akses keuangan, dengan outstanding fintech lending mencapai Rp92,92 triliun per Oktober 2025. Namun, tantangan serius masih dihadapi: kesenjangan geografis dengan konsentrasi pengguna fintech di Pulau Jawa, rendahnya literasi keuangan di sektor nonbank (fintech hanya 12,79 persen), masih adanya 50 juta penduduk tanpa rekening bank, serta maraknya kasus penipuan digital dan pinjaman ilegal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan literasi keuangan digital, perluasan infrastruktur keuangan digital ke daerah 3T, penguatan perlindungan konsumen, serta kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan inklusi keuangan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Kata kunci: Inklusi Keuangan, Layanan Keuangan Digital, Fintech, Literasi Keuangan, Indonesia.

Abstract - This study analyzes the role of digital financial services in promoting financial inclusion in Indonesia, focusing on achievements, challenges, and future development strategies. Using a qualitative approach with case study methods, this research examines various data from the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, and fintech industry players. The findings reveal that Indonesia's financial inclusion index reached 80.51 percent in 2025, an increase of 5.49 percent from 75.02 percent in 2024. However, this achievement conceals a paradox: the financial literacy index only reached 66.46 percent, creating a literacy-inclusion gap of 14.05 percent. Digital financial services including fintech lending, e-wallets, QRIS, and digital payment platforms have become the primary drivers of financial access expansion, with fintech lending outstanding reaching IDR 92.92 trillion by October 2025. Nevertheless, serious challenges remain: geographic disparities with fintech user concentration in Java, low financial literacy in non-bank sectors (fintech only 12.79 percent), 50 million unbanked citizens, and the proliferation of digital fraud and illegal lending cases. This study recommends strengthening digital financial literacy, expanding digital financial infrastructure to underserved regions, enhancing consumer protection, and fostering cross-sector collaboration to achieve quality and sustainable financial inclusion.

Keywords: Financial Inclusion, Digital Financial Services, Fintech, Financial Literacy, Indonesia





Pendahuluan

Keresahan internal dalam konteks finansial inklusi melalui layanan keuangan digital berakar pada kesenjangan yang terus melebar antara pencapaian inklusi keuangan dengan kualitas pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang mereka gunakan. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dirilis OJK dan BPS, indeks inklusi keuangan nasional mencapai 80,51 persen artinya lebih dari 80 persen masyarakat Indonesia telah menggunakan produk dan layanan jasa keuangan formal. Capaian ini meningkat signifikan dari 75,02 persen pada 2024. Namun di balik angka yang menggembirakan ini, terdapat keresahan yang mendalam. Indeks literasi keuangan hanya mencapai 66,46 persen, menciptakan kesenjangan (gap) sebesar 14,05 persen antara literasi dan inklusi. Ini berarti jutaan masyarakat telah mengakses layanan keuangan tanpa pemahaman yang memadai tentang risiko, biaya, bunga, dan kewajiban yang menyertainya. CEO KrediOne Kuseryansyah menggambarkan fenomena ini sebagai paradoks: "Inklusi tanpa literasi ibarat rumah tanpa fondasi, rapuh dan mudah runtuh".

Keresahan ini semakin terasa ketika melihat data sektoral yang mengungkapkan ketimpangan yang sangat tajam. Sektor perbankan mencatat indeks literasi 74,06 persen dan inklusi 83,04 persen. Namun sektor nonbank masih tertinggal jauh: fintech hanya memiliki indeks literasi 35,57 persen dan inklusi 12,79 persen; pasar modal hanya 38,52 persen literasi dan 5,19 persen inklusi; sementara asuransi mencatat 45,45 persen literasi dan 28,50 persen inklusi.

Keresahan yang lebih fundamental adalah pertanyaan tentang kualitas inklusi keuangan: apakah perluasan akses yang didorong oleh layanan keuangan digital benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau justru menciptakan kerentanan baru berupa jeratan utang, penipuan digital, dan eksklusi finansial yang lebih halus? Laporan Global Financial Inclusion Index (Global Findex) 2025 dari Bank Dunia menunjukkan tingkat inklusi keuangan Indonesia masih terbilang rendah yakni 52,39 persen, jauh di bawah rata-rata dunia 75,31 persen sebuah pengingat bahwa perjalanan menuju inklusi keuangan yang sesungguhnya masih panjang.

Di luar dinamika domestik, keresahan eksternal muncul dari pesatnya perkembangan layanan keuangan digital yang tidak selalu diimbangi dengan kerangka perlindungan konsumen yang memadai. OJK mencatat bahwa outstanding pembiayaan fintech peer-to-peer lending mencapai Rp92,92 triliun per Oktober 2025, dengan pertumbuhan 23,86 persen secara tahunan. Namun pertumbuhan ini dibayangi oleh meningkatnya risiko kredit Tingkat Wanprestasi 90 (TWP90) industri





fintech lending mencapai 3,19 persen pada Mei 2025, meningkat dari 2,93 persen pada April 2025 dan 2,79 persen pada Mei 2024.

Keresahan eksternal yang lebih mengkhawatirkan adalah maraknya pinjaman online ilegal dan kasus penipuan digital. Satgas PASTI menerima 4.344 pengaduan pinjol ilegal hanya dalam lima bulan pertama 2025, dan hingga Maret 2025 telah menutup 1.123 entitas ilegal. Kasus penyalahgunaan data pribadi dan penipuan digital membuat masyarakat semakin waspada dan ragu untuk mengadopsi layanan keuangan digital. Ironisnya, industri fintech resmi yang diawasi OJK telah menyalurkan pinjaman dengan outstanding hingga Rp83,52 triliun per Juni 2025 kepada lebih dari 15 juta akun aktif, namun citra industri secara keseluruhan tercoreng oleh ulah oknum ilegal.

Keresahan eksternal lainnya adalah kesenjangan geografis yang persisten. Berdasarkan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), konsentrasi pengguna fintech masih sangat tinggi di Pulau Jawa, sementara akses bagi pekerja informal dan masyarakat di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) masih sangat terbatas. Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjukkan bahwa tingkat penduduk tanpa rekening tertinggi berada di Kalimantan dengan porsi 25,55 persen, disusul Sulawesi, Maluku, dan Papua sebesar 23,47 persen.

Di tingkat global, Indonesia menghadapi tekanan untuk menyelaraskan kebijakan inklusi keuangan dengan standar internasional dan merespons dinamika geopolitik yang memengaruhi arus modal dan stabilitas sistem keuangan. Ratu Maxima dari Belanda, selaku United Nations Secretary-General's Special Advocate for Inclusive Finance for Development (UNSGSA), menekankan bahwa inklusi keuangan seperti memiliki rekening bank hanyalah alat dan bukan merupakan tujuan akhir yang lebih penting adalah financial health atau kesehatan keuangan yang akan memperkuat stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah paradoks inklusi keuangan digital di Indonesia: di satu sisi terjadi pertumbuhan akses yang pesat didorong oleh layanan keuangan digital, namun di sisi lain kualitas pemahaman, pemerataan akses, dan perlindungan konsumen masih sangat timpang. Fenomena pertama adalah pertumbuhan inklusi keuangan yang didorong oleh digitalisasi. SNLIK 2025 mencatat kenaikan indeks inklusi keuangan dari 75,02 persen menjadi 80,51 persen. QRIS terbukti memberikan dampak positif pada peningkatan indeks inklusi keuangan nasional. OJK mencatat bahwa layanan keuangan digital telah menjadi instrumen strategis untuk memperluas akses keuangan masyarakat.





Fenomena kedua adalah kesenjangan literasi-inklusi yang mengkhawatirkan. Dengan literasi 66,46 persen dan inklusi 80,51 persen, terdapat gap 14,05 persen yang menunjukkan bahwa banyak masyarakat menggunakan layanan keuangan tanpa pemahaman yang memadai. Fenomena "banyak akses, minim pemahaman" ini melahirkan kontradiksi: Indonesia dipuji sebagai salah satu pasar pinjaman daring terbesar di Asia Tenggara dengan akumulasi penyaluran melampaui Rp1.000 triliun, namun di sisi lain pengaduan dan kasus penipuan terus meningkat.

Fenomena ketiga adalah ketimpangan sektoral dan geografis yang persisten. Sektor nonbank tertinggal jauh dari perbankan fintech hanya 12,79 persen inklusi, sementara perbankan 83,04 persen. Konsentrasi pengguna fintech di Jawa dan hambatan akses bagi pekerja informal menjadi tantangan serius. Masih ada sekitar 50 juta penduduk Indonesia yang belum memiliki rekening bank pada 2025. Fenomena keempat adalah penguatan kerangka regulasi dan inovasi keuangan digital. OJK bersama BI meluncurkan berbagai inisiatif: BI-OJK Hackathon 2025 untuk mendorong inovasi layanan keuangan digital, peluncuran OJK Infinity 2.0 sebagai pusat inovasi keuangan digital, serta penerbitan POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan bagi UMKM. Pemerintah menargetkan inklusi keuangan 93 persen pada 2029 dan 98 persen pada 2045.

Gap utama dalam finansial inklusi melalui layanan keuangan digital di Indonesia terletak pada ketidakselarasan antara perluasan akses keuangan (kuantitas) dengan kualitas pemahaman, pemanfaatan, dan dampak kesejahteraan dari layanan keuangan yang diakses. Di satu sisi, akses ke layanan keuangan digital telah meluas secara signifikan inklusi keuangan mencapai 80,51 persen, outstanding fintech lending Rp92,92 triliun, dan QRIS telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Namun di sisi lain, literasi keuangan baru 66,46 persen, sektor nonbank tertinggal jauh, 50 juta penduduk masih unbanked, dan kasus penipuan serta pinjaman ilegal terus meningkat. Gap ini menciptakan vicious cycle: rendahnya literasi menyebabkan masyarakat rentan terhadap penipuan dan produk keuangan yang tidak sesuai, yang pada gilirannya mengurangi kepercayaan terhadap layanan keuangan digital, yang akhirnya menghambat perluasan inklusi keuangan yang berkualitas. Sebagaimana diungkapkan oleh CEO KrediOne, inklusi tanpa literasi ibarat rumah tanpa fondasi rapuh dan mudah runtuh.

Theoretical Gap; Secara teoritis, finansial inklusi melalui layanan keuangan digital menghadapi beberapa kesenjangan. Pertama, teori inklusi keuangan tradisional berfokus pada akses terhadap rekening bank dan layanan keuangan dasar. Namun dalam era digital, inklusi keuangan tidak lagi





sekadar "memiliki rekening" melainkan mencakup akses terhadap ekosistem keuangan digital yang kompleks: e-wallet, pinjaman online, investasi digital, asuransi mikro, dan berbagai produk hybrid. Teori-teori yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi dimensi kualitas inklusi, literasi digital, dan ketahanan keuangan (financial resilience) yang menjadi semakin penting.

Kedua, teori adopsi teknologi (seperti TAM dan UTAUT) menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi adopsi teknologi oleh pengguna. Namun dalam konteks layanan keuangan digital, faktor-faktor seperti literasi keuangan, kepercayaan terhadap sistem keuangan, dan perlindungan konsumen yang sangat krusial belum terintegrasi secara memadai dalam model-model teoritis yang ada. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan adopsi layanan keuangan digital menutupi tantangan mendasar dalam hal ketahanan keuangan dan kesenjangan gender yang lebih bernuansa.

Ketiga, teori institusional menjelaskan bagaimana organisasi dan sistem beradaptasi dengan tekanan lingkungan. Dalam konteks inklusi keuangan digital Indonesia, terjadi decoupling antara kebijakan formal (target inklusi, regulasi fintech) dan praktik aktual (rendahnya literasi, maraknya pinjaman ilegal, ketimpangan akses). Theoretical gap ini memerlukan eksplorasi lebih dalam tentang bagaimana institusi keuangan dan regulator dapat menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan implementasi.

Methodological Gap; Kesenjangan metodologis dalam penelitian tentang inklusi keuangan digital di Indonesia tercermin dari beberapa hal. Pertama, dominasi pendekatan kuantitatif dengan data agregat. Sebagian besar penelitian menggunakan data survei berskala nasional (seperti SNLIK OJK-BPS atau Global Findex Bank Dunia) yang memberikan gambaran makro namun tidak mampu menangkap nuansa lokal dan pengalaman individual. Penelitian triangulatif yang membandingkan data demand-side dengan supply-side dan kerangka kebijakan regional masih terbatas.

Kedua, kurangnya penelitian kualitatif mendalam tentang pengalaman aktual masyarakat dalam mengakses dan menggunakan layanan keuangan digital. Penelitian tentang bagaimana masyarakat di daerah 3T mengakses layanan digital, bagaimana pekerja informal memanfaatkan fintech, dan bagaimana korban penipuan digital mengalami kerugian masih sangat terbatas.

Ketiga, belum adanya kerangka pengukuran yang komprehensif untuk mengkaji kualitas inklusi keuangan digital bukan hanya mengukur akses, tetapi juga penggunaan (usage), kualitas (quality), dan dampak kesejahteraan (well-being impact). Artikel penelitian terbaru menggarisbawahi pergeseran penting dari sekadar mengukur akses keuangan menuju evaluasi kualitas dan keberlanjutan inklusi.





Empirical Gap; Secara empiris, masih terdapat kesenjangan antara temuan penelitian dan realitas di lapangan. Pertama, kesenjangan antara data makro dan pengalaman mikro. Meskipun data SNLIK menunjukkan inklusi keuangan 80,51 persen, data Global Findex menunjukkan 52,39 persen, dan LPS mencatat 50 juta penduduk unbanked. Perbedaan metodologi ini menciptakan kebingungan tentang status sesungguhnya inklusi keuangan Indonesia dan menyulitkan perumusan kebijakan yang tepat sasaran.

Kedua, kesenjangan antara pertumbuhan fintech dan pemanfaatan produktif. Meskipun outstanding fintech lending mencapai Rp92,92 triliun, sebagian besar pembiayaan masih terkonsentrasi pada konsumsi而非 sektor produktif. UMKM sebagai tulang punggung ekonomi masih kesulitan mendapatkan pembiayaan yang sesuai.

Ketiga, kesenjangan antara ketersediaan layanan digital dan adopsi riil. Meskipun berbagai platform fintech dan e-wallet tersedia, tingkat adopsi di luar Jawa masih rendah. Annual Members Survey (AMS) 2024–2025 AFTECH menyoroti kesenjangan keahlian sebagai tantangan besar 65,57 persen responden melaporkan kekurangan talenta di bidang AI dan Big Data yang menjadi fondasi penting bagi inovasi dan keamanan digital.

Penelitian tentang finansial inklusi melalui layanan keuangan digital menjadi penting karena beberapa alasan. Pertama, inklusi keuangan merupakan agenda strategis nasional. Pemerintah bersama OJK menargetkan inklusi keuangan 93 persen pada 2029 dan 98 persen pada 2045. Layanan keuangan digital dipandang sebagai instrumen kunci untuk mencapai target tersebut.

Kedua, adanya gap yang signifikan antara literasi dan inklusi keuangan. Dengan literasi 66,46 persen dan inklusi 80,51 persen, jutaan masyarakat menggunakan layanan keuangan tanpa pemahaman yang memadai, menciptakan kerentanan terhadap penipuan, jeratan utang, dan eksklusif finansial. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi akar masalah dan merumuskan solusi.

Ketiga, layanan keuangan digital berkembang pesat namun menimbulkan tantangan baru. Outstanding fintech lending tumbuh 23,86 persen secara tahunan, namun TWP90 meningkat menjadi 3,19 persen dan kasus penipuan digital marak. Penelitian ini penting untuk mengeksplorasi bagaimana layanan keuangan digital dapat dikembangkan secara inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Keempat, kesenjangan geografis dan sektoral yang persisten. Konsentrasi pengguna fintech di Jawa, hambatan akses bagi pekerja informal, dan rendahnya inklusi di sektor nonbank memerlukan





perhatian serius. Penelitian ini penting untuk merumuskan strategi yang tepat sasaran bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan.

Masalah utama dalam finansial inklusi melalui layanan keuangan digital di Indonesia adalah rendahnya kualitas inklusi keuangan di tengah pesatnya perluasan akses digital. Masalah ini berdampak pada: (1) kerentanan masyarakat terhadap penipuan dan produk keuangan yang tidak sesuai; (2) rendahnya pemanfaatan layanan keuangan untuk peningkatan kesejahteraan; (3) ketimpangan akses antar wilayah dan sektor; dan (4) terhambatnya pencapaian target inklusi keuangan nasional.

Akar masalahnya dapat ditelusuri pada beberapa faktor:

1. Faktor Literasi dan Edukasi: Rendahnya literasi keuangan, terutama di sektor nonbank dan di daerah 3T. Banyak pengguna hanya melihat kemudahan akses tanpa menyadari biaya, bunga, dan kewajiban yang menyertainya. Kesenjangan keahlian digital 65,57 persen responden melaporkan kekurangan talenta AI dan Big Data semakin memperparah masalah.
2. Faktor Infrastruktur: Keterbatasan infrastruktur keuangan digital di luar Jawa, terutama di daerah 3T. Tingkat penduduk tanpa rekening tertinggi di Kalimantan (25,55 persen) dan Sulawesi-Maluku-Papua (23,47 persen).
3. Faktor Kepercayaan dan Keamanan: Maraknya kasus penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, dan pinjaman ilegal yang menggerus kepercayaan publik. Satgas PASTI menerima 4.344 pengaduan dan menutup 1.123 entitas ilegal hanya dalam lima bulan pertama 2025.
4. Faktor Regulasi dan Pengawasan: Lemahnya pengawasan terhadap praktik pinjaman ilegal dan perlindungan konsumen. Meskipun OJK telah menerbitkan berbagai regulasi, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan.
5. Faktor Ketimpangan Struktural: Ketimpangan ekonomi dan akses teknologi antar wilayah dan kelompok masyarakat menciptakan digital divide yang mempersulit pemerataan inklusi keuangan.

Tantangan utama dalam mewujudkan finansial inklusi melalui layanan keuangan digital meliputi:

1. Tantangan Literasi Digital dan Keuangan: Meningkatkan literasi keuangan dari 66,46 persen menjadi target yang lebih tinggi, terutama di sektor nonbank dan kelompok rentan. Literasi





keuangan harus didekatkan ke anak muda dan daerah melalui media sosial, komunitas kampus, dan program TV.

2. Tantangan Infrastruktur dan Akses: Memperluas infrastruktur keuangan digital ke daerah 3T dan memastikan konektivitas yang memadai. Mengatasi kesenjangan geografis dengan konsentrasi pengguna fintech di Jawa.
3. Tantangan Kepercayaan dan Keamanan: Membangun kepercayaan publik terhadap layanan keuangan digital di tengah maraknya kasus penipuan dan pinjaman ilegal. Memperkuat perlindungan data pribadi dan keamanan sistem pembayaran.
4. Tantangan Regulasi dan Pengawasan: Memperkuat pengawasan terhadap fintech ilegal dan memastikan kepatuhan industri yang berizin. Menyeimbangkan antara mendorong inovasi dan melindungi konsumen.
5. Tantangan Kualitas Inklusi: Beralih dari sekadar mengukur akses keuangan menuju evaluasi kualitas, penggunaan, dan dampak kesejahteraan inklusi. Memastikan bahwa inklusi keuangan benar-benar meningkatkan kesejahteraan, bukan sekadar menciptakan akses tanpa pemahaman.
6. Tantangan Kolaborasi Lintas Sektor: Memperkuat kolaborasi antara pemerintah, regulator, industri fintech, perbankan, dan masyarakat. OJK memandang kolaborasi lintas otoritas sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kepercayaan publik dan memastikan inovasi berkembang berlandaskan tata kelola, etika, dan perlindungan konsumen.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (case study). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena inklusi keuangan digital yang kompleks dan multidimensi, serta memahami pengalaman, persepsi, dan tantangan yang dihadapi oleh berbagai pemangku kepentingan. Metode Kualitatif: Penelitian kualitatif akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data: Wawancara Mendalam (In-depth Interview): Wawancara semi-terstruktur dengan regulator (OJK, BI), pelaku industri fintech, akademisi, dan pengguna layanan keuangan digital untuk menggali pengalaman, persepsi, dan tantangan dalam inklusi keuangan digital. Focus Group Discussion (FGD) : Diskusi kelompok terfokus dengan kelompok masyarakat di berbagai wilayah (perkotaan, pedesaan, dan daerah 3T)





untuk mengeksplorasi pengalaman akses dan penggunaan layanan keuangan digital. Analisis Dokumen: Analisis dokumen kebijakan (SNLIK OJK-BPS, Global Findex Bank Dunia, roadmap OJK, regulasi fintech) dan laporan industri (AFTECH, AFPI). Observasi: Observasi terhadap penggunaan layanan keuangan digital di masyarakat dan praktik literasi keuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Validitas Data: Penelitian ini akan menggunakan triangulasi sumber data (regulator, industri, akademisi, masyarakat) dan triangulasi metode (wawancara, FGD, dokumen, observasi) untuk memastikan validitas temuan.

Teknik Pengumpulan Data: Wawancara Mendalam: Wawancara semi-terstruktur dengan panduan wawancara yang fleksibel untuk menggali pengalaman, persepsi, dan pandangan informan tentang inklusi keuangan digital. Diskusi kelompok terfokus dengan 6-8 peserta per kelompok untuk mengeksplorasi isu-isu kritis dan mendapatkan perspektif kolektif dari berbagai kelompok masyarakat. Analisis Dokumen: Analisis dokumen kebijakan, regulasi, laporan statistik, dan studi terkait dari OJK, BI, BPS, Bank Dunia, AFTECH, dan AFPI. Observasi: Observasi terhadap praktik penggunaan layanan keuangan digital dan program literasi keuangan di masyarakat. Teknik Analisis Data: Analisis Tematik: Analisis tematik dengan pendekatan induktif dan deduktif. Proses coding akan dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kategori yang muncul dari data. Coding: Coding terbuka, aksial, dan selektif untuk mengorganisir data dan mengembangkan tema-tema utama. Analisis Naratif: Analisis naratif untuk menggali pengalaman dan makna di balik praktik inklusi keuangan digital. Triangulasi: Triangulasi sumber data (regulator, industri, akademisi, masyarakat) dan triangulasi metode (wawancara, FGD, dokumen, observasi) untuk memastikan validitas temuan..

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan analisis terhadap fenomena finansial inklusi melalui layanan keuangan digital di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa layanan keuangan digital telah menjadi pendorong utama perluasan akses keuangan indeks inklusi keuangan mencapai 80,51 persen pada 2025, meningkat dari 75,02 persen pada 2024, dengan outstanding fintech lending mencapai Rp92,92 triliun per Oktober 2025. Namun demikian, pertumbuhan akses ini tidak diiringi oleh kualitas pemahaman dan pemanfaatan yang memadai. Indeks literasi keuangan baru mencapai 66,46 persen, menciptakan





kesenjangan literasi-inklusi sebesar 14,05 persen. Sektor nonbank masih tertinggal jauh fintech hanya 12,79 persen inklusi sementara perbankan 83,04 persen dan 50 juta penduduk masih belum memiliki rekening bank. Fenomena ini mengindikasikan adanya gap struktural antara perluasan akses dan kualitas inklusi keuangan.

Pertama, inklusi keuangan di Indonesia menunjukkan tren positif yang didorong oleh digitalisasi. SNLIK 2025 mencatat indeks inklusi keuangan 80,51 persen, didorong oleh layanan seperti QRIS, e-wallet, dan fintech lending. Pemerintah menargetkan inklusi keuangan 93 persen pada 2029 dan 98 persen pada 2045.

Kedua, kesenjangan literasi-inklusi menjadi tantangan serius. Dengan literasi 66,46 persen dan inklusi 80,51 persen, terdapat gap 14,05 persen. Fenomena "banyak akses, minim pemahaman" membuat masyarakat rentan terhadap penipuan dan produk keuangan yang tidak sesuai.

Ketiga, ketimpangan sektoral dan geografis masih persisten. Sektor nonbank tertinggal jauh dari perbankan, konsentrasi pengguna fintech di Jawa sangat tinggi, dan 50 juta penduduk masih unbanked.

Keempat, tantangan keamanan dan kepercayaan menjadi penghambat utama. Satgas PASTI menerima 4.344 pengaduan dan menutup 1.123 entitas ilegal dalam lima bulan pertama 2025. Kasus penipuan digital menggerus kepercayaan publik.

Kelima, secara teoritis, fenomena inklusi keuangan digital di Indonesia dapat dijelaskan melalui integrasi teori inklusi keuangan, TAM, dan teori institusional yang menunjukkan adanya decoupling antara kebijakan formal dan praktik aktual, serta perlunya pergeseran dari sekadar mengukur akses menuju evaluasi kualitas dan keberlanjutan inklusi.

Secara kritis progresif, penelitian ini menyoroti bahwa pendekatan yang selama ini ditempuh dalam inklusi keuangan digital di Indonesia terlalu berfokus pada aspek kuantitatif (target indeks inklusi, jumlah rekening, outstanding pembiayaan) tanpa memperhatikan aspek kualitatif (literasi, pemahaman, perlindungan konsumen, dan dampak kesejahteraan). Kritik progresif yang diajukan adalah bahwa solusi untuk meningkatkan kualitas inklusi keuangan digital tidak dapat hanya mengandalkan perluasan akses dan penambahan produk digital, tetapi memerlukan pendekatan holistik yang mencakup: Penguatan literasi keuangan digital yang masif dan berkelanjutan, terutama di sektor nonbank dan daerah 3T. Peningkatan kualitas dan perlindungan konsumen melalui regulasi yang lebih ketat dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik ilegal. Pemerataan infrastruktur





keuangan digital ke seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya terpusat di Jawa. Pergeseran paradigma dari sekadar mengukur akses (access) menuju evaluasi penggunaan (usage), kualitas (quality), dan dampak kesejahteraan (well-being impact). Penguatan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, regulator, industri, akademisi, dan masyarakat.

Kritik membangun yang dapat disampaikan berdasarkan analisis ini adalah:

1. Perlu memperkuat program literasi keuangan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya di perkotaan
2. Perlu memperketat pengawasan terhadap fintech ilegal dan praktik penipuan digital
3. Perlu mengembangkan kerangka pengukuran inklusi keuangan yang tidak hanya mengukur akses tetapi juga kualitas dan dampak
4. Perlu mendorong inovasi keuangan digital yang inklusif dan bertanggung jawab, dengan perlindungan konsumen yang kuat
5. Perlu mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas berbagai segmen masyarakat, termasuk pekerja informal dan masyarakat 3T
6. Perlu meningkatkan transparansi tentang biaya, bunga, dan risiko produk
7. Perlu berinvestasi dalam literasi keuangan pengguna sebagai bagian dari tanggung jawab sosial
8. Perlu memperkuat keamanan data dan perlindungan konsumen
9. Perlu mempercepat pembangunan infrastruktur digital di daerah 3T
10. Perlu menyediakan insentif bagi penyedia layanan yang menjangkau daerah terpencil
11. Perlu mengintegrasikan program inklusi keuangan dengan program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan UMKM

Argumentasi bahwa terdapat gap struktural antara perluasan akses dan kualitas inklusi keuangan digital diperkuat oleh beberapa fakta: Fakta Kuantitatif: Inklusi keuangan 80,51 persen versus literasi 66,46 persen gap 14,05 persen. Sektor nonbank tertinggal jauh fintech hanya 12,79 persen inklusi dibanding perbankan 83,04 persen. Fakta Kualitatif: Fenomena "banyak akses, minim pemahaman" membuat masyarakat rentan terhadap penipuan dan produk keuangan yang tidak sesuai. 4.344 pengaduan dan 1.123 entitas ilegal ditutup dalam lima bulan. Fakta Geografis: 50 juta penduduk masih unbanked, dengan tingkat tertinggi di Kalimantan (25,55 persen) dan Sulawesi-Maluku-Papua (23,47 persen). Konsentrasi pengguna fintech di Jawa sangat tinggi. Fakta Global: Global Findex 2025 menunjukkan inklusi keuangan Indonesia 52,39 persen, jauh di bawah rata-rata dunia 75,31





persen mengindikasikan bahwa metode pengukuran yang berbeda menghasilkan gambaran yang sangat berbeda tentang status inklusi keuangan Indonesia.

Refleksi kritis dari penelitian ini adalah bahwa inklusi keuangan digital di Indonesia berada pada persimpangan antara optimisme dan realitas. Di satu sisi, ada optimisme yang besar tentang potensi layanan keuangan digital sebagai instrumen inklusi keuangan. Di sisi lain, realitas menunjukkan bahwa kualitas inklusi masih jauh dari harapan. Akses vs Kualitas: Pertumbuhan akses yang eksplosif tidak boleh mengorbankan kualitas pemahaman dan perlindungan konsumen. Inklusi tanpa literasi hanya akan menciptakan kerentanan baru. Kuantitas vs Dampak: Target indeks inklusi tidak boleh menjadi tujuan akhir. Yang lebih penting adalah apakah inklusi keuangan benar-benar meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keuangan masyarakat. Digital vs Inklusif: Digitalisasi tidak otomatis berarti inklusif. Tanpa memperhatikan kesenjangan akses, literasi, dan infrastruktur, layanan keuangan digital justru dapat memperlebar kesenjangan. Regulasi vs Implementasi: Regulasi tanpa penegakan yang efektif hanya akan menciptakan decoupling antara kebijakan dan praktik. Diperlukan pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas.

Kesimpulan

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa layanan keuangan digital telah menjadi pendorong utama perluasan akses keuangan di Indonesia, dengan indeks inklusi keuangan mencapai 80,51 persen pada 2025. Namun, kualitas inklusi masih menghadapi tantangan serius kesenjangan literasi-inklusi 14,05 persen, ketimpangan sektoral dan geografis yang persisten, maraknya penipuan digital, dan 50 juta penduduk yang masih unbanked. Diperlukan pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada perluasan akses, tetapi juga pada penguatan literasi, pemerataan infrastruktur, perlindungan konsumen, dan pengukuran dampak kesejahteraan untuk mewujudkan inklusi keuangan yang berkualitas dan berkelanjutan. Secara khusus, penelitian ini menyimpulkan: Tentang Kondisi Eksisting: Inklusi keuangan Indonesia mencapai 80,51 persen pada 2025, didorong oleh layanan keuangan digital. Namun, literasi keuangan baru 66,46 persen dan sektor nonbank tertinggal jauh. Tentang Faktor Penghambat: Faktor utama penghambat adalah rendahnya literasi keuangan, kesenjangan infrastruktur, maraknya penipuan digital, dan lemahnya perlindungan konsumen. Tentang Faktor Pendorong: Faktor pendorong utama adalah digitalisasi layanan keuangan (QRIS, e-





wallet, fintech lending), dukungan regulasi OJK dan BI, serta target inklusi keuangan nasional. Tentang Dampak: Inklusi keuangan digital berdampak positif pada perluasan akses, namun dampak terhadap kesejahteraan dan ketahanan keuangan masih perlu dikaji lebih dalam. Tentang Kebijakan: Diperlukan kebijakan yang tidak hanya fokus pada target kuantitatif, tetapi juga pada kualitas literasi, pemerataan akses, dan perlindungan konsumen. Penelitian ini memperkaya literatur tentang inklusi keuangan di negara berkembang dengan menunjukkan bahwa pertumbuhan akses (kuantitas) tidak selalu diikuti oleh kualitas pemahaman dan pemanfaatan sebuah temuan yang menantang asumsi optimis tentang inklusi keuangan digital. Penelitian ini memperluas aplikasi Technology Acceptance Model (TAM) dalam konteks layanan keuangan digital dengan menunjukkan bahwa adopsi tidak hanya ditentukan oleh persepsi manfaat dan kemudahan, tetapi juga oleh literasi keuangan, kepercayaan, dan faktor kontekstual seperti infrastruktur. Penelitian ini mengintegrasikan teori inklusi keuangan, TAM, dan teori institusional dalam satu kerangka analitis yang komprehensif untuk memahami fenomena inklusi keuangan digital di Indonesia.

Referensi

- ANTARA News. (2025, November 27). Prabowo, Queen Maxima discuss Indonesia's financial inclusion, health. ANTARA News.
- ANTARA News. (2025, November 22). LPS: 50 juta penduduk belum punya rekening, dorong literasi keuangan. ANTARA News.
- Bisnis.com. (2025, September 7). Inklusi Keuangan RI 52,39%, Tertinggal dari Singapura, Thailand, dan Malaysia. Bisnis.com.
- Bisnis.com. (2026, January 12). Sumber Dana Fintech Pinjol Didominasi Perbankan, Sentuh Rp60,79 Triliun per November 2025. Bisnis.com.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025. Jakarta: OJK dan BPS.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan Indonesia 2026–2030. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Surat Edaran OJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kategori Lender Profesional dan Non-Profesional. Jakarta: OJK.
- Bank Indonesia. (2025). Laporan Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia 2025. Jakarta: Bank Indonesia.

